

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGUPAHAN PEKERJA DALAM
PENGOLAHAN RAJUNGAN**
(Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

ITA DWI FITRIANI
NPM :1721030246



Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGUPAHAN PEKERJA DALAM
PENGOLAHAN RAJUNGAN**
(Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**ITA DWI FITRIANI
NPM : 1721030246**

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak pemilik usaha dengan pihak penerima upah sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang di buat. Namun pemilik pengolahan rajungan mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan yang diberikan kepada pekerja pengolahan rajungan yang tidak berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama, namun upah yang diberikan berdasarkan perjanjian di awal dengan di berikan upah perhari 100.000, tapi saat ini upah jadi menurun 70.000 perharinya, menurut pemilik pengolahan rajungan hal ini terpaksa di turunkan karena harga kepiting rajungan semakin naik.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan di Home Industri Desa Ketapang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi dan pengumpulan data sekunder.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik pengolahan rajungan mengubah perjanjian tersebut mengambil keputusan secara sepihak yang merugikan para pekerja sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar perjanjian kerja juga tidak memenuhi rukun dan syarat akad. Menurut Hukum Islam tidak dibenarkan karena rukun dan syaratnya melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Dwi Fitriani
NPM : 1721030246
Jurusan : Hukum Ekonomi (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGOLAHAN RAJUNGAN**” (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penulis,

Ita Dwi Fitriani



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 703289

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGOLAHAN
RAJUNGAN**

**(Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Ita Dwi Fitriani

NPM : 1721030246

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masvukroh, S.Ag, M.Si
NIP. 197304142000032002

Abuza Alghifari, M.Ag.
NIP. 198712222019031006

Ketua Jurusan Muamalah,

Khoiruddin, M.Si

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGOLAHAN RAJUNGAN (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)**, disusun oleh **Ita Dwi Fitriani, NPM. 1721030246**, jurusan **Muamalah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 26 Juli 2021**

Tim Penguji

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Penguji III : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. B. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, Shahih).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa’atnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak Alm. Triyanto dan Ibu Indar Krismiati, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak kandungku tersayang Ari Saputro yang senantiasa memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku.
3. Semua Keluargaku yang telah memberikan motivasi terbesar. Berkat Do’a, dan dukungan semangat dan senyum semangatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ita Dwi Fitriani, dilahirkan di Bangun Rejo pada tanggal 30 Januari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Alm. Triyanto dan Ibu Indar Krismiati. Pendidikan dimulai dari TK Dharma Wanita Persatuan dan selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Bangun rejo dan tahun 2010, kemudian Kelas 6 SD pindah ke SD Negeri 2 Ketapang dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Islamiyah Ketapang dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Ketapang dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA DALAM PENGOLAHAN RAJUNGAN”** (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan). terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul, M.S.I. selaku sekretaris jurusan muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tuaku, Kakakku tersayang, dan semua keluargaku terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
7. Kawan seperjuangan Mahasiswa Jurusan Muamalah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama untuk mewujudkan suatu cita-cita yang diinginkan.

8. Untuk Sahabat Kecilku Rika Isna Cahya Terimakasih Atas dukungannya.
9. Teman-teman KKN-DR Kelompok 142 yang telah menemani suka dan duka, dan belajar bersama tentang banyak hal lainnya selama 40 hari.
10. Kepada Seluruh Masyarakat Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Lampung Selatan yang telah bersedia diwawancara untuk dimintai pandangan mengenai masalah yang diteliti.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Semoga atas bantuan semua pihak Allah Swt berkenan memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Bandar Lampung, 25 Mei 2021
Penulis

ITA DWI FITRIANI
1721030246

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian)	15
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad	17
3. Macam-Macam Akad	20
4. Asas-Asas Dalam Berakad	23
5. Sah dan Batalnya Akad	37
6. Berakhirnya Akad	28
7. Hikmah-Hikmah Dalam Berakad	29

B. Sistem Pengupahan.....	29
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	29
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	33
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	36
4. Macam-Macam Upah (<i>Ijarah</i>)	39
5. Waktu Pemberian Upah (<i>Ijarah</i>).....	39
6. Sistem Upah Dalam Islam.....	40
7. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak	52

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Lampung Selatan	55
1. Sejarah Desa Ketapang	55
2. Kondisi Geografis Desa Ketapang	57
B. Praktik Pengupahan Pekerja Pengolahan Rajungan di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Lampung Selatan	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengupahan Pekerja Pengolahan Rajungan di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Lampung Selatan	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan Di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Lampung Selatan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Presentase Tingkat Pendidikan Desa Ketapang	57
2. Tabel 3.2 Daftar Nama Masjid di Desa Ketapang	58
3. Tabel 3.3 Presentase Data Kependudukan (Kelamin).....	59
4. Tabel 3.4 Mata Pencaharian Desa Ketapang	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian Desa Ketapang Lampung Selatan

Lampiran 2. Surat Penelitian Surat Penelitian Dinas Penanaman
Modal Lampung Selatan

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 9. Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagaimana kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan” (Studi di Home Industri Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan). Judul ini terdiri dari beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang di lakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²

Praktik Pengupahan adalah pelaksanaan secara nyata pembayaran upah pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 1529.

²Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2 (2017): 24.

³Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 107.

Pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan pendapatan atau upah baik itu berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau majikan.

Pengolahan adalah suatu proses atau caraperbuatan dalam mengolah. Pengolahan lebih kepada proses pembuatan sesuatu.

Rajungan adalah hewan yang hidup pada habitat yang beraneka ragam misalnya pantai dengan dasar yang berpasir, pasir lumpur, dan di laut terbuka. Dalam keadaan biasa, rajungan hidup dengan berdiam di dasar laut sampai kedalaman lebih dari 65m, tetapi sesekali dapat juga terlihat berenang dekat ke permukaan laut. Rajungan merupakan nama sekelompok kepitng dari beberapa marga anggota suku Portunidae. Jenis-jenis kepiting ini dapat berenang dan sepenuhnya hidup di laut.

Berdasarkan penjelasan dari istilah judul tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk mengkaji mengenai Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan di tinjau dari perundang-undangan maupun dari Hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan memiliki keunggulan dalam komoditas hasil laut, oleh karena itu membutuhkan penanganan dan pengolahan hasil laut yang tepat dan meningkatkan nilai jual. Salah satu komoditas hasil laut yang banyak di perairan indonesia adalah Rajungan. Rajungan (*Portunus Pelagicus*) merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual tinggi, baik sebagai komoditas lokal maupun komoditas ekspor. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan di nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang di tetapkan dan di

bayarkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan dan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan di lakukan.⁴

Bekerja menjadi Pengolah Rajungan merupakan pekerjaan yang sudah di lakukan sejak dulu oleh masyarakat desa ketapang, Pengolahan Rajungan merupakan Pengolahan Home Industri yang terletak di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang, yang di kelola di Area Perumahan Penduduk atau di Gudang Pengolahan Rajungan di Tepi Pantai. melihat adanya praktik pengupahan pengolahan rajungan di desa ketapang yang dalam pelaksanaannya tidak ada ketetapan upah yang di berikan pengusaha kepada pekerja, di awal perjanjian ada perjanjian bahwa pekerja pengolahan rajungan akan di berikan upah sehari sekali dengan upah 100.000 per orang, namun saat ini upah pekerja jadi menurun dan itu mengakibatkan dan menghambat kebutuhan hidup keluarga para pekerja. Ketidakjelasan inilah yang sering menimbulkan kekecewaan bagi buruh karena upah tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa sistem pengupahan pengolahan rajungan di desa ketapang kecamatan ketapang lampung selatan belum sesuai dengan pengupahan dalam islam. Adapun Firman Allah dalam Al-quran yang memerintahkan kaum muslimin untuk pekerja yaitu yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

⁴Muh Barid Nizarudin Wajdi, “Monopoli Dagang Dalam Kajian Fqih Islam” *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2, (2016), 81-99.

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu di beritakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S At-Taubah ayat 105).

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain di tuangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus dipahami dan di patuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, hal ini di sebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar bagi masing-masing pihak bila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis.⁵Salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu pengupahan dalam pengolahan Rajungan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi maka penulismengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan”**.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja DalamPengolahan Rajungan.

⁵Veronika Nugraheni Sri Lestari, “Pejajaranan Dart Pikiran Ke Hati Merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi”(2017). 59.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan?

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pengembangan ilmiah terkait praktik pengupahan pekerja dalam pengolahan rajungan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Rohimah (2012), yang berjudul “Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber rejo Kecamatan Kemiling”, yang berisi tentang Sistem upah di pabrik tahu desa sumber rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip tentang sistem upah. Di dalam kegiatan usaha di perjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapatkan oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. UKM ini sejak awal berdiri tetap konsisten dalam sistem pengupahan yaitu menggunakan upah berdasarkan hasil produksi, berkembangnya UKM ini juga dapat terlihat dari terus bertambahnya tenaga kerja

dari tahun ke tahun di pabrik ini.⁶ Sedangkan yang penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan, yaitu pembayaran upah tidak sesuai perjanjian di awal.

Penelitian lain yang di lakukan oleh Deston Saputra (2013), yang berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam di desa padang tambak kecamatan way tenong, kabupaten Lampung Barat”, yang berisi tentang Sistem Pengupahan Pekerja Penghimpun Dana Pembangunan Masjid Nurul Amal di Desa Padang Tambak adalah pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan Sistem Pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapat upah Rp. 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp. 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp. 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp. 30.000 untuk upah hariannya. Nominal kesepakatan upah telah di setujui oleh para pekerja pencari dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana. Dalam proses pembayarannya pengupahan para pekerja pencari dana di lakukan secara langsung dan di bayarkan saat pekerjaannya sudah selesai di lakukan pada hari itu.⁷ Adapun yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu jika dalam skripsi mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang praktik pengupahan pekerja dalam pengolahan rajungan.

Penelitian yang di lakukan oleh Nur Khofifah (2018), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”, yang berisi tentang pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dilakukan oleh buruh dengan pengusaha emping yaitu dengan menggunakan sistem setor.

⁶Rohimah, “Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Pada Pabrik Tahu Bandung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2012), 87.

⁷Deston Saputra, “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid di Tinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus Tentang Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2013), 77.

Sistem setor merupakan perbuatan saling menyerahkan antara buruh dengan pengusaha emping, dimana buruh menyerahkan hasil pekerjaannya setelah beberapa hari untuk mendapatkan upah dari pengusaha. Sistem upah yang di gunakan antara buruh dengan pengusaha yaitu menggunakan sistem upah potongan dan praktik pengupahan dapat dikategorikan dalam upah khusus. Berdasarkan tinjauan hukum Islam menunjukkan upah buruh emping jika di lihat dari rukunnya sudah terpenuhi. Namun jika dari syaratnya, ada syarat yang belum sesuai dengan upah. Dalam arti lain sistem pengupahan buruh emping hukumnya batal. Meskipun demikian upah yang di peroleh mengandung banyak kemaslahatan terkait keadaan yang dibutuhkan para buruh. Karena bekerja dengan sistem upah buruh ini merupakan salah satu cara untung menunjang kebutuhan hidup.⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pengupahan pekerja dalam pengolahan rajungan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematis. Metode di sini di artikan sebagai suatu cara atau teknis yang di lakukan dalam proses penelitian. Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode yang akan di gunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dan suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

Dengan demikian dapat di pahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan

⁸ Nur Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 73.

langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu suatu bentuk Penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan Fenomena yang ada, baik Fenomena yang bersifat Alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan Fenomena lain. Fenomena disajikan apa adanya hasil Penelitiannya di uraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Hasil Penelitian Deskriptif sering di gunakan.⁹ Dalam penelitian ini akan di deskriptifkan tentang bagaimana sistem pengupahan pengolahan rajungan di desa ketapang kalianda kecamatan ketapang lampung selatan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, di kategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang di lakukan di lapangan atau di responden.¹⁰ Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literature yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

⁹Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁰Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara yang bersumber dari pemilik, tenaga kerja pengolahan rajungan di desa ketapang kalianda kecamatan ketapang lampung selatan.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari hasil membaca buku-buku, dokumentasi atau literatur lainnya yang menunjang permasalahan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang di tetapkan untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.¹² Populasi juga dapat di artikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber di ambil sebagai sumber data yang di perlukan oleh peneliti yaitu 1 pemilik dan 25 pekerja pengolahan rajungan di Desa Ketapang Kalianda Kecamatan Ketapang Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili populasi yang dapat memberikan gambaran keadaan populasi dan memberikan sumber informasi data-data dari penelitian. Jadi, sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat memberikan gambaran

¹¹Suharyadi dan Purwantu, *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 14.

¹²Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

populasinya.¹³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu tipe penarikan sampel nonproabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dalam hal unit yang dianggap paling bermanfaat dan representatif.¹⁴ Maka peneliti menetapkan 1 pemilik pengolahan rajungan dan 5 orang pekerja pengolahan rajungan yang akan menjadi informan peneliti, peneliti mengambil 5 pekerja karena 5 itu sudah mewakili dalam menjawab penelitian. Sesuai dengan *Purposive sampling* pada penelitian ini, terdapat beberapa kriteria yaitu:

1. Pekerja pengolahan rajungan yang sudah bekerja selama 5 tahun
2. Pekerja pengolahan rajungan yang sudah bekerja selama 2 tahun
3. Pekerja pengolahan rajungan yang sudah bekerja selama 1 tahun.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden. wawancara ini ditujukan kepada orang-orang tertentu, seperti mewawancarai pemilik dan pekerja pengolahan rajungan Di Desa Ketapang Kalianda Kecamatan Ketapang Lampung Selatan.

¹³Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2008), 57.

¹⁴Morissan, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), 117.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan atau ditempat yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, gambar-gambar, surat kabar, agenda, dan sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam peroleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus-rumus tertentu, metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data skunder. Adapun beberapa cara atau rumusan untuk memperoleh dalam pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses pemeriksaan data atau *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau rumusan masalah.

c. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal

ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar di tarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literature yang ada dilapangan kemudian di tarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum.¹⁵ Selain metode induktif penulisan ini juga menggunakan metode deduktif yaitu fakta-fakta yang sifatnya umum atas peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut di tarik generalisasi yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sistem pengupahan pengolahan rajungan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan diatas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB 1 :Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang

¹⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 181.

memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

:Pada bab ini menguraikan landasan teori yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan pekerja dalam pengolahan rajungan yang meliputi akad (perjanjian), yaitu pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas dalam berakad, dan hikmah-hikmah dalam berakad. Sistem pengupahan yaitu di antaranya pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, waktu pemberian upah, kewajiban dan hak masing-masing pihak.

BAB III

: Bab ini menguraikan tentang gambaran umum tentang desa ketapang yaitu sejarah desa ketapang, kondisi geografis desa ketapang, dan temuan tentang praktik pengupahan pekerja pengolahan rajungan.

BAB IV

: Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi, Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan pekerja dalam pengolahan rajungan.

BAB V

: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian)

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹⁶ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁷

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung di kemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Imran : 76).

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang di buat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang di buat orang tersebut, seperti

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 97.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

yang di jelaskan dalam Surat Ali-Imran ayat : 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁸

Firman Allah dalam Al-Qur'an yakni :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ
الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 1).

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syari'atkan. Terkadang kata Akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.¹⁹

Istilah fiqih, secara umum Akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah. Maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyari'atkan dan

¹⁸ Sohari Ru'fah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979) 42.

¹⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keluarga Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 26.

berpengaruh dalam sesuatu.²⁰ Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “Akad” dalam hukum islam. Kata Akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Beberapa tafsiran dari kitab suci Al-Qur’an menyatakan bahwa kata ‘aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun akad, lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-kewajiban dari tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan dalam versi ini, Al-Zajjaj mengatakan: “Allah SWT mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban dimana dia akan memaksa mereka, dan menjaga akad dimana mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan pernyataan-pernyataan dari agama.”²¹

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²² Sedangkan menurut Mustafa Az-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu Akad merupakan ikatan secara hukum yang di lakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu’jib* dan pelaku (pihak) kedua di sebut *qaabil*.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 4.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) 68.

keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh Akad, rukun-rukun Akad ialah sebagai berikut:²³

1. '*Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh '*Aqid*, antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan Akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

²³ Nurhayati, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 125.

2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan..
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
4. *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sighat al 'aqd* ialah:
 - a) *Sighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
 - b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
 - c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk Akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:²⁴

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 49.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:²⁵

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang di laksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu

²⁵*Ibid*, 50.

yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:

1. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini:
 - a. Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
 - b. *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
 - c. *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batiniyah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).
2. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan,

seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata, “Buku ini pura-pura saya jual kepada Anda” atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl*.

Kecelakaan-kecelakaan kehendak disebabkan hal-hal berikut:

- a) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- b) *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- c) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.

Selain Akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

1. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.
 - b. Akad *ghair musammah*, ialah akad yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
2. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - a. Akad *musyara'ah*, ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b. Akad *mamnu'ah*, ialah akad-akad yang dilarang syara' seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - a. Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

- b. Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
 - a. Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b. Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 5. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b. Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

4. Asas-Asas Dalam Berakad

Menurut kamus besar bahasa indonesia, asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis, fondasi, bangunan, asal, pangkal dan prinsip-prinsip.²⁶ Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Ada delapan asas berakad dalam islam, yaitu asas *ilahiah*, asas kebebasan berakad, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan (tidak memberatkan), asas amanah dan asas keadilan. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiah* atau asas *tauhid*.²⁷ Asas *ilahiah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

²⁷ Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 30.

sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.²⁸

1) Asas *ilahiah*

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2) Asas Kebebasan Berakad

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*) atau bisa juga diartikan sebagai suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.²⁹

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain :

a) Q.S Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S Al-Ma'idah : 1).

²⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 125.

²⁹ Ahmad Izzan, *Refrensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 40.

- b) Kaidah hukum Islam, “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”³⁰

3) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai berikut :³¹

- a) Q.S An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa’ : 29).

- b) Q.S An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’ : 4).

³⁰Ibid, 42.

³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 87.

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqih*, "perintah pada dasarnya menunjukkan wajib." Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat yang dimaksud adalah :³²

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya." (Q.S Al-Isra' : 34).

5) Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

7) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa." (Q.S Al-Ma'idah : 8).

³²Ibid, 89.

5. Sah dan Batalnya Akad

Meskipun sudah terbentuk akad, tetapi belum menjadi sah, apabila belum memenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu :

1. Bebas dari gharar.
2. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan.
3. Bebas dari syarat-syarat fasid.
4. Bebas dari riba untuk akad atas beban.

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu :

1. Adanya kewenangan atas objek (asset yang menjadi objek).
2. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang di maksud tidak terpenuhi. Dalam Mazhab Hanafi tingkat kebatalan dan keabsahan itu dibedakan menjadi 5 tingkatan, yaitu :

1. Akad batil.
2. Akad fasid.
3. Akad maukuf.
4. Akad nafiz gair lazim.
5. Akad nafiz lazim.

Keseluruhan akad dalam berbagai tingkat kebatalan dan keabsahan sebagaimana tersebut diatas di bedakan menjadi dua golongan pokok, yaitu :

1. Akad yang tidak sah, yang meliputi akad batal dan akad fasid.
2. Akad yang sah dengan tiga tingkatan, yaitu akad maukuf, akad nafiz gair lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak) dan akad nafiz lazim (akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan telah mengikat penuh).

6. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad di pandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan), atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut :

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang di sebutkan dalam akad rusak. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar syart*, *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah fasakh.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati.
4. Karena kewajibanyang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang di tentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat di perpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

7. Hikmah-Hikmah Dalam Berakad

Berakad diantara sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad, hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut:³³

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Sistem Pengupahan

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.³⁴

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologis *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan didunia.³⁵

³³ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 128.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 15.

³⁵ A. Riawan Amin.Sc., *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam) (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 145.

Secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.³⁶

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³⁷

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.³⁸

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

³⁷ Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81.

³⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 4.

manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.³⁹

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁰ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Upah adalah pembayaran yang di terima pekerja selama pekerja melakukan pekerjaan atau di pandang melakukan pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang No.13 tahun 2003 upah adalah “hak pekerja yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan di lakukan.”⁴¹ Upah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena keinginan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup. Bila tingkat upah yang di tawarkan oleh pengusaha di nilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang di tawarkan. Sebaliknya, ada juga pekerja

³⁹ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), 180.

⁴⁰ Alfaruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), 361.

⁴¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30.

yang bekerja dengan tingkat upah berapapun. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Menurut ekonomi klasik, upah adalah harga untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak.

Hal-hal yang termasuk dalam Pengupahan yaitu :⁴²

a. Upah Pokok

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang di bayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya di tetapkan berdasar perjanjian;

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang di berikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang di bayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan.

c. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan di berikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta di bayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang di atur pada bagian “Pengupahan” tepatnya di mulai dari pasal 88 sampai dengan pasal 98. Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai pengupahan di kutip secara keseluruhan terhadap Pasal-Pasal di maksud sebagai berikut :⁴³

⁴²Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, *Pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah* (No.SE-07/MEN/1990, Tahun 1990).

⁴³Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1-4.

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana di maksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- 4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana di maksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinnya, seperti Abu bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma.

1. Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib):”sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang yang baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27).

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: CV Toha Putra, 1984), 350.

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S An-Nahl : 97).

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

4. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja atau buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh ditetapkan dan di bayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁴⁵

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja atau buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

2. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui : 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴⁶

⁴⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁶Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 178.

3. Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir.

4. Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

b. Syarat Upah (*Ijarah*)

Adapun Syarat-Syarat Upah (*Ijarah*) adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-*ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang

⁴⁷ Ghufuran A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

3. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat
Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
4. Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

5. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan,
maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan
menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak
tercapai maksud akad tersebut.

4. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Di dalam Fiqih Muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁴⁸

5. Waktu Pemberian Upah (*Ijarah*)

Para Ulama Fiqih membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dan pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Pendapat Ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain :⁴⁹

- a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
- b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh

⁴⁸ M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insni Press, 2002), 67.

⁴⁹ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 170.

yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.

- c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

6. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Di dunia islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antaraa perusahaan satu dengan yang lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah di tawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tengaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar di segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya.⁵⁰

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah rasul. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerjayang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

⁵⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 128.

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran.”(QS. An-Nahl : 90).

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat di kemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat di artikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat di tarik pengertian bahwa pemberi kerja di larang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya).Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atau masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha.Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus di penuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

a. Prinsip keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak di peringatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*” nya beserta keluarga yang

menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam Firman Allah yang berbunyi :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar di batasi tiap-tiap diri terhadap apa yang di kerjakannya, dan mereka tidak akan di rugikan.”(QS. Al-Jaatsiyah : 22).

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah di kerjakannya dan masing-masing tidak akan di rugikan. Ayat di atas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang di dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.⁵¹ Adil dapat di golongankan menjadi empat yaitu :

⁵¹Wuryanti Koentjoro, *Upah Dalam Perspektif Islam*(Jurnal: Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011).

1) Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan di bandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

2) Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila di bandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama.

3) Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan di bandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

4) Keadilan Procedural

Keadilan procedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang di gunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.

Seorang pengusaha tidak di perkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah di tetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang di berikan buruh. Adil mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai berikut :

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْدَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282).

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Hal ini menjelaskan bahwa selain hak pekerja, maka pekerja memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari pekerja dengan baik. Bahwa bekerja dengan baik merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya.

2) Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proporsional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada rugikan.” (QS. Al-Ahqaf : 19).

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

“Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm : 39).

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

“Dan kamu tidak di balas, melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Yaasin : 54).

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang di curahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah di nilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang di perhatikan adalah jasa (manfaat) yang di berikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut di perlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi ijarah harus di perhatikan tenaga yang di curahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa di bebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan dan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia di anggap telah menganiaya pekerjaannya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjaannya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu'ara : 183).

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Upah yang layak di tunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Di samping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang di kehendaknya. Demi kemakmuran dan kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak. Secara empiris ada tiga komponen yang di anggap mempengaruhi besarnya upah minimum yaitu :

1) Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

Kebutuhan fisik minimum adalah kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup tersebut secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi.

3) Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk berkembang di daerah yang bersangkutan.

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil.

Penetapan upah pekerja dalam islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang di berikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang di keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah di berikan secara layak berarti upah yang di terima pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan

adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

c. Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang di berikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak di bayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka di paksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.

Metode kedua yang dianjurkan oleh islam dalam menentukan standar upah di seluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan di lakukan. Upah bergungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi di nyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang akan di tetapkan menurut suatu persetujuan sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Upah di definisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak di berikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang di berikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang di hasilkan atau banyak pelayanan yang di berikan.

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk di analisa di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:

1. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari pada golongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.

3. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja dalam teori sering kali di umpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja.

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain, terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relatif lebih rendah. Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para penganggur itu berpindah tempat di mana terdapat kekurangan tenaga kerja di hadapi. Perbedaan tingkat upah juga bisa di timbulkan karena perbedaan keuntungan yang

tidak berupa uang. Perbedaan tingkat upah bisa juga di sebabkan oleh ketidaktahuan atau juga keterlambatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

7. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

a. Kewajiban pemberian kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang di pekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari permasalahannya. Apakah ada unsur kelalaian atau disengaja maka ia harus bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan atas kelalaian baik dengan cara mengganti atau dengan kebijakan lain.

Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja dengan baik serta berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja yang harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja kepada dirinya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan.

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni:⁵²

⁵² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja, sedangkan upah nya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijarah* untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka *Ijarah* tersebut batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Riawan Amin.Sc., Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam) (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010).
- A.Mas'adi Ghufuran, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keluarga Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2008).
- Abdullah Ruf'ah, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Adam Panji, *Fiqih Muamalah Adabiyah* (Bandung : PT Refika Aditama, 2018).
- Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2004).
- An-Nabhan Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1996).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ebook). Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas. 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).

Dewi Germala, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005). 71

Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Grafindo Persada Pratama, 2007)

Izzan Ahmad, *Refrensi Ekonomi Syariah* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007).

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta : Gema InsniPress, 2002).

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta. 2015.

Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya : Terbit Terang, 2005).

Nazir Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Nugraheni Sri Lestari Veronika, *Pejiarahan Dart Pikiran Ke Hati (Merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi,danPembangunan Ekonomi)*. 2017.

Nurhayati, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. , *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Purwantu dan Suharyadi, *Statistika: Untuk Ekonomi Keuangan Modern*.Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Rahman Alfaruz, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1989).

Al-Maragi Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang : CV Toha Putra, 1984).

Rivai Veithzal, *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik* (Jakart : PT. Bumi Aksara, 2011).

Ru'fah Sohari, *Fiqh Muamalah* (Bogor : PT Raja Grafindo Persada, 1979).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung : PT. Alma'arif, 1987).

Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta : Afandi M. Yasid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Logung Pustaka).

Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Wijayanti Asri, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Zainal Asikin, Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1angka 30.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*
Pasal 88 Ayat 1-4.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jurnal

Iryani Eva, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*: Vol. 17 No. 2 2017.

Koentjoro Wuryanti, *Upah Dalam Perspektif Islam* (Jurnal: Fakultas Ekonomi Unissula Semarang, 2011).

Rohimah, *Analisis Sistem Upah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber rejo Kecamatan Kemiling*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Inttan Lampung. 2012.

Saputra Deston, *Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa PadangTambak, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat*. Metro: Institut Agama Islam Negeri. 2013.

Wajdi Muh Barid Nizarudin, Monopoli Dagang Dalam Kajian Fqih Islam. *AT-Tahadzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2. 2016.

Wawancara

Agus Nugroho, “Pekerja Pengolahan Rajungan”, *Wawancara*, Mei 6, 2021.

Anton Maulana, “Pekerja Pengolahan Rajungan”, *Wawancara*, Mei 6, 2021.

Diki Saputra, “Pekerja Pengolahan Rajungan”, *Wawancara*, Mei 6, 2021.

Repal Setiawan, “Pemilik Pengolahan Rajungan”, *Wawancara*, Mei 6, 2021.

Wawan, “Pekerja Pengolahan Rajungan”, *Wawancara*, Mei 6, 2021.

Yadi Saputra, “Pekerja Pengolahan Rajungan”, *Wawancara*, Mei 6, 2021.